

## MODEL KEBIJAKAN MIXED SCANNING DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA CIANJUR SELATAN

Yaya Mulyana<sup>1</sup>, Abu Huraerah<sup>2</sup>, Rudi Martiawan<sup>3</sup>  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan  
Email: mulyana\_yaya@yahoo.com

### ABSTRAK

Pariwisata telah tumbuh secara spektakuler sebagai sektor andalan di berbagai negara dalam mendapatkan devisa dan pertumbuhan ekonomi, termasuk Indonesia. Demikian juga untuk salah satu daerah di Indonesia, Kabupaten Cianjur yang memiliki berbagai tempat wisata menarik dan banyak dikunjungi oleh wisatawan seperti Cipanas. Pariwisata di Kabupaten Cianjur tidak hanya di Cianjur Utara tetapi juga di Cianjur Selatan memiliki potensi wisata yang sangat potensial. Namun sayangnya manajemen belum optimal sehingga potensinya belum dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji sejauh mana model formulasi kebijakan pariwisata yang inkremental, elitis dan rasional dirasakan secara komprehensif terhadap model pemindaian campuran dalam mengembangkan pariwisata Cianjur Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengeksplorasi objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data dalam bentuk wawancara, sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan kebijakan yang ada belum dapat secara optimal meningkatkan kinerja sektor pariwisata.

**Kata kunci:** *Model Formulasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata dan Pemerintah Daerah.*

### PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa pariwisata Indonesia memiliki banyak keunggulan kompetitif dan komparatif. Kementerian Pariwisata RI telah memproyeksikan pada tahun 2019 industri pariwisata akan menjadi penghasil devisa terbesar di Indonesia, yaitu sebesar US \$20 miliar atau sekitar Rp300 triliun. Sehingga diharapkan, masuknya devisa tersebut akan berdampak langsung kepada perbaikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2019 ini, pemerintah menargetkan sektor pariwisata Indonesia dapat menjadi yang terbaik di kawasan ASEAN dengan pesaing utama adalah Thailand dengan pendapatan lebih dari US \$40 miliar atau sekitar Rp 600 triliun.

Menurut data *World Travel & Tourism Council* (W TTC) tahun 2018, kekuatan pariwisata Indonesia sudah berhasil menempati peringkat ke-9 di dunia, peringkat ke-3 (ketiga) di Asia, dan

peringkat ke-1 di Asia Tenggara. Peringkat tersebut didasarkan pada penilaian terhadap 4 indikator penilaian, yaitu: (1) total PDB perjalanan & turisme, (2) belanja pengunjung asing (ekspor pengunjung), (3) belanja domestik, dan (4) investasi modal pada sektor perjalanan & wisata. Selain itu, berdasarkan data *Lonely Planet*, Indonesia masuk peringkat ke-7 (ketujuh) negara terbaik untuk liburan tahun 2019. Sebuah situs pemandu perjalanan asal Inggris, *Rough Guides* juga telah melansir daftar 20 negara terindah di dunia pada tahun 2019 ini dan Indonesia berhasil menempati peringkat ke-6 (keenam) negara terindah di dunia.

Tidak dapat dibantah lagi bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan dalam meningkatkan pendapatan dari devisa khususnya bagi daerah yang memiliki potensi pariwisata ini sehingga selain dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tetapi juga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di

sekitarnya. Oleh karena itu wajar jika sektor pariwisata menjadi salah satu sektor penting yang terus menerus dikembangkan dengan baik oleh pemerintah sendiri maupun dengan bekerjasama dengan pihak investor baik dalam negeri maupun asing. Sebab pariwisata sendiri bagi kebanyakan masyarakat sendiri sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan.

Seperti dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. (*undang-undang republik indonesia nomor 10.tahun 2009 tentang kepariwisataan, 2009*)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan salah satu sektor sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah maupun kesejahteraan bagi masyarakatnya. Disamping bahwa pariwisata selain mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional dan meningkatkan kesempatan kerja tetapi juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (Yoeti, 2008)

Sebagaimana daerah lain, Kabupaten Cianjur memiliki beragam tempat wisata yang menarik yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Khususnya daerah utara Cianjur sudah dari dulu banyak diminati oleh wisatawan mancanegara, Selain pemandangan alam yang indah kondisi wilayah tersebut cenderung memiliki udara dingin dan infrastruktur relatif bagus. Selain itu jarak juga memengaruhi banyaknya wisatawan yang lebih memilih untuk berkunjung ke lokasi wisata tersebut. Namun pariwisata di Kabupaten Cianjur

bukan saja Cianjur Utara tetapi Cianjur Selatan pun memiliki potensi pariwisata yang tak kalah bagus dengan Objek wisata didaerah Cianjur Utara, seperti Pantai Jayanti, Pantai Cidaun yang memiliki keindahan Pantainya, danau leuwisoro, Curug Cikondang dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang berada di daerah Cianjur Selatan. Objek-objek wisata ini selayaknya mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah setempat. Namun sayangnya, pengelolaan pada beberapa objek wisata tersebut belum optimal. Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dan masih terkendala masalah infra struktur, manajemen pariwisata dan SDM nya dalam menunjang kegiatan pariwisata. Pola pengelolaan kawasan pariwisata yang tidak menyeluruh telah menimbulkan dampak negatif daya tarik obyek wisata. (*Perda Prov. Jawa Barat No. 15 Tahun 2015 Tentang "Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, 2015*).

Pengembangan kegiatan pariwisata masih berfokus di daerah Cianjur utara dan itu pun hanya pengembangan aspek fisik saja, dengan hanya mengembangkan potensi alamnya, misalnya Kebun Raya Cibodas, Pantai Jayanti, Curug Citambur, Waduk Jangari, *Tracking* Gunung Gede, dan Kota Bunga. Sementara untuk pengembangan kegiatan pariwisata belum terlihat upaya menciptakan obyek pariwisata baru, seperti dengan mengembangkan potensi wisata pantai yang berada di daerah Cianjur Selatan dan budaya lokal Kabupaten Cianjur pada umumnya yang bisa dijadikan daya tarik bagi pariwisata di Kabupaten Cianjur seperti upacara adat yang dimiliki atau kegiatan unik. Wisata kebudayaan potensial yang terus-menerus dikembangkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Cianjur adalah Situs Gunung Padang Cianjur, Pantai Jayanti, Pantai Sereg dan atau Pantai Apra Sindangbarang, Argabinta yang berada di daerah Cianjur Selatan yang hingga dewasa ini banyak dikunjungi wisatawan. Pantai di Cianjur Selatan memang belum bisa disejajarkan dengan Pantai Palabuhanratu di

Kabupaten Sukabumi yang sudah lebih dulu menjadi kawasan wisata pantai atau Pantai Pangandaran di Kabupaten Pangandaran. Namun, daya tarik yang dimiliki oleh Cianjur selatan dinilai tak kalah menarik. Hanya saja memang konsep penataannya masih alakadarnya.

Dilihat dari obyek dan daya tarik yang ada, Kabupaten Cianjur relatif memiliki jumlah obyek wisata yang lengkap, mulai dari obyek wisata alam, buatan dan obyek wisata budaya cukup tersedia. Sebagai suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW), potensi kepariwisataan di daerah Kabupaten Cianjur telah memiliki daya tarik cukup kuat bagi kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Hal ini seharusnya mampu menjadi bahan kebijakan pemerintah daerah pada khususnya, untuk memperbaiki dan membawa sektor pariwisata daerah menjadi lebih baik. Bahkan dengan potensinya itu, pengembangan sektor pariwisata ini dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah sendiri (PADS) bagi Pemkab Cianjur yang cukup signifikan bahkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini akan menguraikan tentang model kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan perkembangan kepariwisataan di wilayah Cianjur Selatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Cianjur. Dimana formulasi kebijakan yang bersifat inkremental dengan meniru atau melanjutkan kebijakan sebelumnya terasa sangat dominan tetapi tidak mengubah keadaan di satu sisi. Dan di sisi lain model pendekatan yang bersifat rational komprehensif juga masih dominan seperti terlihat dalam produk Perda Kepariwisataan serta dokumen-dokumen kajian para konsultan yang cukup detail dan komprehensif seperti kajian *Kawasan Strategis dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Cianjur Selatan, 2017*, dengan analisis deskriptif dan SWOT terhadap

objek wisata di Cianjur selatan tetapi mengalami kendala dan kesulitan ketika akan diimplementasikan.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kepariwisataan di Kabupaten Cianjur, khususnya terhadap model formulasi kebijakan yang lebih bersifat mixed scanning artinya pengamatan gabungan antara pendekatan model inkremental dan rational komprehensif sehingga hasilnya diharapkan akan lebih optimal dalam upaya pengembangan pariwisata daerah.

## KAJIAN PUSTAKA

Formulasi kebijakan adalah suatu aktifitas yang mengandung unsur politik, walau ini tidaklah dilakukan seorang anggota parpol. (Jones CG, Lawton JH, 1994) Dengan menggunakan perencanaan yang lebih netral pun tidak dapat menghindari dan mengubah hal yang demikian. Saling mempengaruhi persepsi seseorang dalam merumuskan kebijakan pastilah tidak dapat dihindari. Masing-masing pembuat kebijakan yang memiliki persepsi berbeda akan menyarankan bagaimana agar ide atau perencanaan dan rancangan miliknya tersebut dapat ditetapkan.

Tjokroamidjojo mengatakan bahwa folicy formulation sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam hal ini didalamnya termasuk pembuatan keputusan. Lebih jauh tentang proses pembuatan kebijakan negara (publik). Sedangkan menurut Anderson dalam (Winarno, 2008:93) mengatakan perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi.

Memahami formulasi kebijakan publik berarti kita perlu mengetahui model-model perumusan kebijakan publik yang telah banyak digunakan selama ini oleh

negara/lembaga /institusi dalam menetapkan keputusannya. Menurut Thomas R. Dye dalam bukunya *Understanding Publik policy* setidaknya terdapat Sembilan model formulasi kebijakan, yaitu: model sistem, model elite, model institusional, model kelompok, model proses, model rasional, model incremental, model pilihan publik, dan model teori permainan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Syahrir (2018), menunjukkan bahwa perumusan kebijakan retribusi perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing) di Kota Surabaya serta model apakah yang sesuai dengan model perumusan kebijakan retribusi perpanjangan IMTA di Kota Surabaya maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain bahwa model formulasi kebijakan yang digunakan dalam kebijakan retribusi perpanjangan IMTA di Kota Surabaya ini adalah Model Kelembagaan (Institutional). Dimana model ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan yang dibuat sepenuhnya adalah hak pemerintah dan bersifat paksaan.(Mutiara Syahrir, 2018)

Sedangkan penelitian ini akan melihat formulasi kebijakan dalam pengembangan pariwisata di Cianjur selatan dari model mixed scanning yang merupakan model gabungan atau melengkapi kekurangan yang ada pada pendekatan inkremental dan rational komprehensif.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran analisis tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Cianjur.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dan penyebaran angket kepada para wisatawan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian yaitu melalui dokumen, arsip,

jurnal penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Cianjur, yaitu pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, pihak praktisi, wisatawan, dan pihak akademisi bidang pariwisata di Kabupaten Cianjur.

Objek penelitian pada penelitian ini adalah hal-hal yang terkait dengan kepariwisataan di Kabupaten Cianjur, yaitu daerah-daerah di Cianjur Selatan Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui:

Survei melakukan pengamatan secara langsung ke daerah yang menjadi lokasi penelitian.

Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

Studi dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data yang diperlukan dari dokumen/arsip yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Newman (2000: 145) mengatakan “*qualitative data are empirical* (data kualitatif merupakan empiris). *They involve documenting real events, recording what people say (with words, gestures, and tone), observing specific behaviors, studying written document, or examining visual images*”(Bobby Newman Dana R. Reinecke Deborah L. Meinberg, 2000) Oleh karena data dalam penelitian kualitatif adalah data empiris (berupa observasi lapangan ke objek penelitian), maka pengumpulan data pun bergerak dari lapangan empiris untuk memperoleh data dan teori. Teknik analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan analisis *Multiple Levels of Analisis* .(John W. Creswell, 2008)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pariwisata adalah suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya yang bersifat sementara, dilakukan baik oleh perorangan ataupun kelompok. Dimana hal itu dilakukan sebagai usaha untuk mencari keseimbangan atau keserasian dan

kebahagian hidup yang berhubungan dengan lingkungannya. memahami pariwisata sebagai suatu upaya transformasi orang untuk sementara waktu atau jangka pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja dalam keseharian. (A. J. Burkart and S. Medlik., 1974) Dengan bahasa yang berbeda Wahab (2003) mengartikan pariwisata sebagai salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja peningkatan penghasilan, serta dapat menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks dan potensial, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik atau tradisional, seperti kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan/hotel, dan sarana transportasi.

Dalam kajian yang dilakukan Putra, (2012) dikatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan suatu kecincaayaan dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat banyak sekali manfaat dan keuntungan yang bisa diperoleh sektor pariwisata ini, diantaranya dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat mengembangkan seni budaya daerah dan pengembangan kerajinan lokal sehingga dapat dipasarkan kepada wisatawan, dan yang tak kalah pentingnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sendiri (PADS).

Tentu saja dalam upaya pengembangan pariwisata dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk memperlancar jalannya kegiatan tersebut, seperti ketersediaan SDM yang berkualitas, anggaran yang memadai, dan dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah yang memprioritaskan bidang pariwisata ini.

Oleh karena itu agak mustahil suatu upaya pengembangan pariwisata tanpa adanya dukungan hal-hal tersebut. Tinggal Pemerintah daerah bagaimana mengupayakannya apakah dengan menggaet investor, meningkatkan kapasitas SDM dengan berbagai pelatihan dan Diklat serta

yang tidak kurang pentingnya adalah political will dari pemerintah daerahnya dalam berbagai bentuk kebijakan yang mendukung dan kondusif.

Dalam pengembangan pariwisata tidak bisa dipungkiri pentingnya aspek pasar, dengan memperhatikan juga aspek sifat, objek dan daya tarik wisatanya apakah bersifat alam atau budaya dengan tetap memperhatikan aspek pelestariannya dan berdasarkan aspek pasar (Mill, R.C and Morisson, A.M. 1985). Oleh karena itu, suatu pengembangan pariwisata memerlukan perencanaan secara regional, propinsi, nasional yang disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta berbagai issues yang berkembang.

Sehubungan dengan itu, pengembangan pariwisata daerah didasarkan pada peraturan yang ada di daerah dengan melibatkan partisipasi dan preferensi masyarakat sebagai bentuk realisasi paradigma baru yang lebih melibatkan dan memberdayakan masyarakat. Sehingga diharapkan proses perencanaan pengembangan pariwisata yang melibatkan pemikiran dan perencanaan nasional dan pemikiran masyarakat akan menghasilkan perencanaan komprehensi yang lebih terpadu.

Strategi upaya untuk pengembangan pariwisata di Indonesia telah tercermin dalam rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, yakni untuk:

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata;

Guna mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup;

Guna meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar; dan Untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan,

dan bebas KKN untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan.

Arah perencanaan Nasional pengembangan pariwisata guna menghasilkan susunan pengembangan kawasan konservasi. Arah konsep kawasan mempunyai fungsi utama sebagai pelestarian. Sementara pemanfaatannya hanya dilakukan terhadap aspek estetika, pengetahuan (pendidikan dan penelitian) terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati, pemanfaatan jalur untuk *tracking* dan *adventuring*. Proses yang hampir sama dapat dilakukan terhadap perencanaan pariwisata wilayah Provinsi dan perencanaan ini akan menghasilkan kawasan pengembangan pariwisata. Dengan demikian, perencanaan pada level Provinsi ini merupakan perencanaan yang menampung perencanaan tingkat lokal dengan menjabarkan dan tetap konsisten berpedoman pada perencanaan di tingkat nasional dan tidak boleh yang bersifat bertentangan.

Pengembangan pariwisata yang dilihat dari aspek kebijakan dalam pengembangan wisata dapat menciptakan perluasan lapangan kerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan pariwisata alam membutuhkan investasi yang tidak sedikit khususnya untuk membangun infrastrukturnya. Sebagian orang berpendapat bahwa pengembangan pariwisata alam yang berbentuk ekoturisme belum berhasil berperan sebagai alat konservasi alam maupun untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyebabnya tidak lain adalah persoalan klasik yaitu sulitnya mendapatkan dana pengembangan bagi aktivitas pariwisata tersebut.

Ada beragam definisi tentang kebijakan kepariwisataan seperti dikemukakan oleh ahli pariwisata. Misalnya Goeldner dan Ritchie (2006) mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan atau promosi serta strategi yang memberikan kerangka dalam pengambilan keputusan

individu maupun kolektif yang secara langsung mempengaruhi pengembangan pariwisata dalam jangka panjang dan sekaligus kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi. Sementara itu, Biederman (2007) mengemukakan bahwa prinsip dari kebijakan kepariwisataan adalah harus menjamin negara maupun daerah mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kontribusi sosial dan ekonomi yang diberikan pariwisata. Biederman juga menyebutkan bahwa sasaran akhir dari kebijakan pariwisata adalah peningkatan kemajuan negara atau daerah dan kehidupan warga negaranya.

*'A tourism policy defines the direction or course of action that a particular country, region, locality or an individual destination plans to take when developing or promoting tourism. The key principle for any tourism policy is that it should ensure that the nation (region or locality) would benefit to the maximum extent possible from the economic and social contributions of tourism. The ultimate objective of a tourism policy is to improve the progress of the nation (region or locality) and the lives of its citizens.'* (Edgell Sr, David L., Allen, Maria D., Smith, G., Jason, 2008)

Tentu saja sebagai sebuah kebijakan, bidang pariwisata merupakan sebuah produk kebijakan dari proses yang sangat kompleks dan terkait sama lain dengan berbagai aspek. Kompleksitas pariwisata disebabkan oleh berbagai aspek yang saling terkait pada berbagai level dari tingkat lokal, nasional dan global. Pada titik inilah kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan penting dalam pengembangan pariwisata, sebab tanpa dukungan kebijakan pengembangan pariwisata akan sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan pariwisata adalah industri yang bersifat multidimensi dan lintas sektoral. Oleh karena itu, keterlibatan dan partisipasi semua pihak dibutuhkan karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri tetapi multi sektor yang saling terkait. Terlebih pertimbangan keterkaitan antar sektor dan penanganan

pariwisata semakin kompleks dalam pengembangan suatu destinasi pariwisata yang terpadu (Brawnwel dalam Theobald (ed), 2005: 406).

Keterlibatan dan Intervensi pemerintah terhadap pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan memberikan *incentive* dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, seperti dalam bentuk aturan pemanfaatan lahan konservasi, melindungi budaya lokal, membatasi akses wisatawan terhadap daerah-daerah yang rawan terhadap kerusakan, mengedukasi perilaku wisatawan yang peduli dan berwawasan lingkungan, menghemat sumber energi dan alam yang langka, mengurangi polusi dan memberikan *incentive* terhadap pembangunan infrastruktur yang juga bermanfaat bagi *host* seperti sistem transportasi, perlindungan terhadap ruang hijau kota dan taman nasional, seperti di Sukabumi yang sedang dikembangkan seperti taman nasional Ciletuh.

Sebuah pilihan instrumen kebijakan akan sangat menentukan jika didasarkan kepada hasil kajian yang utuh dan tidak parsial. Demikian juga pilihan kebijakan itu harus didasari oleh moralitas dan kemauan politik yang baik. Isu-isu yang berkembang saat ini mengenai perencanaan pariwisata lebih menekankan aspek teknis saja padahal sebenarnya merupakan masalah politik dan kebijakan yang menyangkut regulasi terhadap semua komponen pariwisata yang ada dalam rangka menuju pariwisata berkelanjutan (Theobald, 2005). Oleh karena itu, fungsi pembuat kebijakan menjadi sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pariwisata yang akan diambil untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan demikian perlu pemahaman yang baik bagi pembuat kebijakan tentang konsep perencanaan pariwisata yang baik dan berkelanjutan.

Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi dasar pemikirannya adalah untuk, *pertama*,

meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa atau kemudahan yang diperlukan bagi wisatawan mancanegara yang hendak berkunjung ke Indonesia dan kemudahan bagi wisatawan nusantara dalam melakukan perjalanan untuk mengenali, mencintai alam dan ragam budaya Indonesia. *Kedua*, mengambil langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan pemeratakan pembangunan. *Ketiga*, secara proaktif melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata. *Keempat*, menggunakan tema “*Indonesia Ultimaty in Diversity*” dalam setiap kegiatan promosi di luar negeri dan tema “Kenali Negerimu Cintai Negerimu. Ayo Tamasya Jelajahi Nusantara” dalam setiap kegiatan promosi di dalam negeri. (*inpres. nomor 16 tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata*, 2005)

Hal itu sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 01 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Cianjur dan Penyelenggaraan Kepariwisata, yang dijelaskan bahwa Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Cianjur adalah “Mewujudkan Cianjur Sebagai Destinasi Pariwisata Pangan Mandiri”. Dalam mewujudkan visinya ditempuh melalui misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:

- a. mewujudkan Destinasi Pariwisata pangan mandiri berkelas nasional yang mengintegrasikan kekayaan potensi pariwisata daerah yang khas dan berdaya saing global;
- b. membangun struktur Industri Pariwisata Yang kuat dan terintegrasi, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan budaya dalam menghadapi persaingan global;

- c. membangun Pemasaran Pariwisata yang terpadu, efektif dan efisien, serta bertanggung jawab dalam membangun Citra pariwisata di Kabupaten berskala nasional; dan
- d. membangun Kelembagaan Kepariwisataan yang mampu meningkatkan integrasi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten dan menciptakan sumber daya manusia yang berkompentensi baik nasional maupun internasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Cianjur bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pengembangan potensi pariwisata alam dan budaya;
- b. mewujudkan pembangunan dan pengembangan pariwisata buatan dan industri kreatifitas Kabupaten dalam membentuk identitas kepariwisataan Kabupaten;
- c. mewujudkan potensi pariwisata pangan Kabupaten sebagai destinasi pariwisata berkelas nasional dan internasional yang berkelanjutan;
- d. mewujudkan industri pariwisata Kabupaten yang berwawasan lingkungan dan budaya Kabupaten;
- e. mewujudkan kemitraan antara industri pariwisata mikro, kecil, menengah dan besar di Kabupaten dalam pengembangan produksi dan distribusi berbasis lokal, tingkat nasional dan internasional;
- f. mewujudkan sistem pemasaran pariwisata secara terpadu di Kabupaten untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan;
- g. optimalisasi peran Pemerintah Kabupaten, dan pemangku kepentingan terkait kepariwisataan, serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan;
- h. mewujudkan pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan yang berkualitas, ramah lingkungan, dan terpadu secara regional, nasional, dan internasional untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataan yang

berkelanjutan dan berdaya saing global; dan mendorong pemberian insentif dan disinsentif kepada pemangku kepentingan yang mendukung pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut maka lingkup Pembangunan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Cianjur mencakup:

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yang tema khas pengembangan dan mampu menjawab isu strategis, serta mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten;

Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Unggulan Kabupaten (KPPUK) yang memiliki tema khusus untuk pengembangan dan prioritas pembangunan kepariwisataan, serta mampu menjawab dan mewujudkan visi misi pembangunan kabupaten.

Enam lokasi dalam kajian ini meliputi enam kecamatan yang ada di KSPK pantai Jayanti-Aprasinarlaut-dan sekitarnya. Kecamatan tersebut yaitu: Kecamatan Cidaun ; dengan ODTW Rest Area Cilaki, Pantai Jayanti, Pantai Ciwidig. Kecamatan Sindangbarang ; dengan ODTW Pantai Apra. Kecamatan Agrabinta ; dengan ODTW Pantai Tipar Sinarlaut. Kecamatan Leles ; dengan ODTW Air Panas Sukasirna. Potensi Wisata Budaya Cianjur Selatan

Fakta menunjukkan bahwa kekayaan alam dan budaya di Cianjur Selatan sangat beranekaragam, hal tersebut menjadi sebuah potensi dalam bidang pariwisata. Selain keindahan alam Cianjur Selatan menyimpan potensi, budaya tradisional yang juga dapat dijadikan sebagai potensi untuk meningkatkan bidang pariwisata. (Laporan Akhir Kajian Kawasan Strategis dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Cianjur Selatan, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dengan PT Puri Dimensi, 2017). Berikut beberapa budaya khas daerah Cianjur Selatan:



Pertama, Bugel adalah fenomena alam yang biasa terjadi di beberapa muara sungai di wilayah Cianjur Selatan. Fenomena Bugel ini terjadi setiap musim kemarau tiba. Fenomena Bugel terjadi karena aliran sungai terbendung Oleh pasir-pasir pantai yang tertiuip angin dan menutupinya dan semakin lama akan membentuk menjadi bendungan/tanggul yang menghambat/menutupi aliran sungai tersebut. Pada saat Bugel ini merupakan pesta rakyat, karena pada saat Bugel banyak ikan Yang terperangkap di muara.

Kedua, sebuah tradisi yang unik di daerah Cianjur selatan ada lah tradisi nyalawena. Nyalawena adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan sejak dahulu. Aktifitas ini adalah momen berkumpulnya seluruh warga pesisir pantai untuk mengambil hasil kekayaan berupa ikan-ikan kecil. Nyalawena berasal dari kata salawé yang artinya dua puluh lima. Nyalawé berarti melakukan kegiatan pada tanggal 25 bulan Islam, terutama di dachrah sekitar pantai Apra, Sindangbarang, Cianjur.

Ketiga, kesenian tutunggulan merupakan kesenian khas daerah Cianjur. Saat ini Sanggar seni Samudra jaya di kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur sering mementaskan kesenian ini. Kesenian ini berasal dari Warungkondang, Kabupaten Cianjur, ada sebuah kesenian tradisional yang bernama “tutunggulan”. Sebenarnya istilah ini tidak asing lagi bagi masyarakat Warungkondang karena pada saat-saat tertentu, yaitu ketika memberaskan padi, maka tutunggulan pun terdengar.

Keempat, kesenian lais merupakan kesenian khas Jawa Barat. Lais adalah kesenian tradisional berupa pertunjukan akrobatik yang menggunakan seutar tali sepanjang kurang lebih 6 meter yang dibentangkan diantara 2 ruas bambu pada ketinggian 12 - 13 meter. Kesenian ini sudah ada sejak jaman Belanda serta cukup populer di Garut, namun sayang kesenian lais mulai jarang dimainkan dan nyaris punah. Kesenian Lais berasal dari Kampung Nangka Pait, Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut. Kesenian lais pada

awalnya diambil dari nama seorang laki-laki yang sangat terampil dalam memanjat pohon kelapa.

Kenyataan menunjukkan bahwa pada awalnya makanan hanya menjadi salah satu pelengkap kegiatan wisata. Kuliner khas suatu daerah saat ini sudah menjadi salah satu daya tarik wisata, dan Cianjur selatan menyimpan potensi kuliner khas diantaranya Jalangkring dan Kasem. Kedua kuliner ini berkaitan dengan tradisi Nyalawena di daerah Cianjur Selatan. Ikan hasil tangkapan dari tradisi Nyalawena biasanya dibuat Jalngkring, yaitu kuliner yang berbentuk dendeng yang terbuat dari “impun” sebagai hasil dari tradisi Nyalawena. Impun hasil tangkapan pada tradisi Nyalawena juga dibuat Kasem. Kasem adalah panganan yang menggunakan ikan sebagai pokoknya, dan disimpan dalam waktu yang lama untuk fermentasi alami sehingga membentuk dan menghasilkan rasa yang asam. (*World Tourism Organization. 1995, 1995*)

Visi pemerintah untuk menjadikan Kabupaten Cianjur sebagai destinasi unggulan pariwisata Jawa Barat tampaknya masih membutuhkan waktu. Kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan masih belum bisa meningkatkan kinerja sektor pariwisata secara optimal. Hal ini terlihat dari perkembangan posisi daya saing pariwisata Kabupaten Cianjur, yang dilihat dari hasil analisis yang cenderung menurun dan belum optimal.

Misalnya indikator-indikator yang nilai daya saingnya menunjukkan tren pertumbuhan yang negatif antara lain pembangunan infrastruktur, dan kurangnya promosi pariwisata, Buruknya infrastruktur jalan tentunya bukan merupakan tanggung jawab langsung dinas pariwisata melainkan dinas pekerjaan umum. Namun, hal ini mengindikasikan bahwa masih kurang baiknya koordinasi antar dinas yang seharusnya menjadi salah satu fokus kebijakan. (Rina Trisnawati, Wiyadi Wiyadi, 2008).

Disbudpar Kabupaten Cianjur harus lebih meningkatkan komunikasi ke dinas lain yang memiliki peranan penting terhadap

sektor pariwisata Kabupaten Cianjur. Menurunnya kunjungan wisata tampaknya dikarenakan kurangnya promosi dan inovasi dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata yang ada di Kabupaten Cianjur. Sejak kebijakan dijalankan, hampir tidak ada inovasi-inovasi baru dari objek wisata yang ada untuk bisa menarik wisatawan untuk datang.

Suardana, I Wayan, (2016), Lebih lanjut, kebijakan yang masih belum optimal juga bisa dilihat dari terlalu berfokusnya pembangunan daya tarik wisata ke kawasan Puncak-Cipanas sedangkan objek wisata yang ada di kawasan Cianjur Selatan masih kurang tertata. (I Wayan Suardana, 2016) Hal ini menyebabkan kurang berkembangnya akomodasi wisata seperti hotel, penginapan, restoran, dan villa yang ada di kawasan Cianjur Selatan karena kurangnya minat investor untuk berinvestasi di kawasan ini. Bahkan banyak restoran, rumah makan, atau pun tempat-tempat penjualan cenderamata yang sudah ada harus gulung tikar karena sepi pengunjung yang datang

Pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Cianjur harus meningkatkan daya saing pariwisata, terutama indikator-indikator yang menunjukkan pertumbuhan yang negatif dan posisi yang lebih rendah, serta faktor-faktor yang berpengaruh signifikan dari hasil analisis untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata guna mencapai visi sebagai destinasi wisata unggulan Jawa Barat. Selain itu, kawasan wisata Cianjur Tengah dan Selatan juga harus lebih diperhatikan oleh pemerintah karena potensi yang ada di wilayah ini masih sangat besar untuk dieksplorasi.

Identifikasi faktor-faktor kritis dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap kendala dan tantangan perkembangan pariwisata di lokasi kajian Cianjur selatan. Kendala yang harus dijawab dalam pengembangan wisata di daerah Cianjur Selatan adalah:

1. aksesibilitas menuju wisata masih sangat rendah. Kondisi jalan dalam keadaan

berat dan sempit. Pengembangan wisata di daerah Cianjur Selatan membutuhkan aksesibilitas yang tinggi untuk mempercepat perkembangan di wilayah tersebut. Misalnya akses dari kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta harus memadai dan mudah. Dengan adanya tol Seroja ke wilayah Cianjur selatan dapat lebih mudah dengan akses tol melalui Ciwidey.

2. gerbang dan petunjuk lokasi objek wisata masih kurang. Gerbang dan Petunjuk jalan menuju daerah wisata akan menarik untuk mengunjungi lokasi yang menjadi daerah tujuan wisata, fasilitas pariwisata masih terbatas. Fasilitas pariwisata seperti penginapan dan restoran jumlahnya masih terbatas. Bahkan yang adapun terasa kurang memadai, penginapan yang agak memadai misalnya sudah dibangun di daerah ranca buaya tetapi itu wilayah Kabupaten Garut sedangkan di wilayah Cianjur Selatan ini sendiri masih sangat kurang.
3. fasilitas sosial dan fasilitas umum masih terbatas. Fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, fasilitas keuangan, pom bensin, masih terbatas di wilayah Cianjur Selatan. Fasilitas ini bukan hanya dibutuhkan untuk kemajuan pariwisata, tetapi juga oleh masyarakat.

Selain terdapatnya kendala pengembangan pariwisata di daerah Cianjur Selatan, beberapa tantangan lain yang harus dihadapi di antaranya adalah : pertama, bagaimana meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat *dan stake holder* lainnya tentang urgensi pariwisata bagi kemajuan dan kesejahteraan daerahnya. Kedua, upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai pengelola utama pariwisata di daerahnya. Ketiga, Peningkatan akses menuju lokasi wisata, khususnya kualitas jalan dan angkutan umum. Keempat, pengembangan sumber daya wisata agar menjadi daerah tujuan wisata yang melalui pengemasan dan pengelolaan produk wisata, Kelima, pengembangan kelembagaan pengelolaan pariwisata tingkat desa di masing-masing

daerah tujuan wisata. Keenam, pengembangan kemitraan dengan stake holder lain seperti pihak pengelola cagar alam, tambak udang dll dalam rangka pengembangan pariwisata. Ketujuh, pengelolaan pengunjung yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan dan pemasukan daerah. Kedelapan, pengembangan pemasaran berbasis teknologi informasi

Kendala dan tantangan pengembangan wisata di daerah Cianjur Selatan, terdapat *critical factor* yang harus ditangani diantaranya: , **Pertama**, upaya peningkatan kesadaran kolektif masyarakat dan stake holder lainnya tentang pariwisata di daerahnya. **Kedua**, upaya pengembangan kelembagaan pengelolaan pariwisata tingkat desa di masing-masing daerah tujuan wisata. **Ketiga**, pengembangan kemitraan dengan stake holder lain seperti pihak pengelola cagar alam, tambak udang dll dalam rangka pengembangan pariwisata. **Keempat**, Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, melalui perbaikan kualitas jalan dan angkutan umum. **Kelima**, upaya pengembangan produk wisata yang berkualitas termasuk cenderamata atau oleh-oleh sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Dengan demikian, berbagai masalah dan kendala itu sedikitnya akan tereliminasi atau bahkan hilang jika di dalamnya ada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Komitmen pemerintah mempunyai peranan kunci terhadap keberhasilan pencapaian pembangunan di bidang pariwisata. Kuat lemahnya derajat komitmen pemerintah suatu negara dalam pembangunan pariwisata mempengaruhi tingkat keberhasilan pengembangan pariwisata. Dapat dipahami bahwa komitmen pemerintah yang kuat akan mampu memobilisasi sumber daya yang dimiliki, sehingga pengembangan pariwisata dapat semakin dipercepat dan dioptimalkan. Kegiatan bisnis pariwisata bersifat multisektoral, yang melibatkan berbagai sektor yaitu perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, kesehatan, pertahanan dan keamanan, industri, masyarakat, pemerintah

daerah dan sebagainya Hal ini memerlukan peran pemerintah untuk melakukan mobilisasi yang mampu menggerakkan seluruh kepentingan pariwisata dari tingkat nasional sampai tingkat masyarakat lokal. Komitmen untuk mensinergikan berbagai kepentingan antar sektor sangat penting disini, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Upaya pengembangan pariwisata dengan memberikan peluang bagi pengusaha lokal untuk berpartisipasi dan berinvestasi dalam berbagai industri pariwisata menjadi kebijakan yang harus dilakukan pemerintah baik Pusat maupun daerah. Keterlibatan ini akan menunjukkan sensitivitas efek pengembangan pariwisata terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial. Pemerintah menetapkan standar untuk pembangunan pada daerah pariwisata. Misalnya seperti di Bali ketinggian bangunan tidak melebihi pohon kelapa atau 15 meter, rasio lahan atau area bangunan dengan ruang terbuka hijau, struktur dan desain bangunan sesuai dengan karakter lokal, pemanfaatan produk lokal, dan persyaratan lainnya terkait dengan optimalisasi produk lokal

Dalam pengelolaan kebijakan pariwisata di Kabupaten Cianjur, secara teoritis dihadapkan pada tiga model formulasi kebijakan yaitu: pertama, **Model Rasional-komprehensif**. Menurut Hoogerwerf seperti yang dikutip dalam Islamy (1988, hal. 4.2) model analisis kebijakan rasional-komprehensif (sinoptis) adalah salah satu analisis dari sudut hasil atau dampak yang memiliki maksud bahwa proses perumusan kebijakan publik itu akan membuahkan hasil atau dampak yang baik kalau didasarkan atas proses pemikiran yang rasional yang didukung oleh data atau informasi yang lengkap (komprehensif). Penganalisisan dilakukan dengan teliti, cermat dan detail dengan memanfaatkan sejumlah besar data/informasi yang harus dikumpulkan hingga membuahkan hasil dalam bentuk keputusan/kebijakan yang memberi dampak positif.

Dapat diartikan bahwa model rasional-komprehensif (sinoptis) berpandangan bahwa baik buruknya hasil

yang akan dicapai dari perumusan kebijakan publik harus didasarkan pada pemikiran yang rasional atau sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan kemampuan yang dimiliki, analisis yang dilakukan harus memiliki data atau informasi yang lengkap, sehingga dalam analisisnya tidak memiliki cacat atau mencapai kesempurnaan tanpa kesalahan.

Kedua, **Model Inkremental**, model ini, dicetuskan oleh Charles E. Lindblom dalam bukunya yang berjudul “*The Science of Muddling Through*” dikutip dari Islamy(1988, hal. 4.17) menjelaskan mengenai proses pembuatan keputusan dengan model yang disebut “disjointed incrementalism” atau disebut dengan model inkremental. Inkremental sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit-sedikit. Model ini memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah dimasa lalu dengan hanya menambah atau merubahnya (modifikasi) sedikit-sedikit. Analisis dengan model inkremental ini memberikan jalan berbeda dari rasional-komprehensif (sinoptis), selain menawarkan kemudahan dalam analisis karena tidak perlu melakukan analisis secara cermat dan teliti, cukup melihat kebijakan yang telah ada kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang terus berubah, cukup melakukan utak-atik penyesuaian, hal tersebut sudah merupakan analisis.(Achdiat -, 2017)

**Ketiga, Model Gabungan/Mixed Scanning**. Model ini adalah gabungan dari model rasional dan model incremental. Dilihat bahwa kedua model tersebut sama-sama memiliki kekurangan yang cenderung membuat pengambilan keputusan tidak rasional dan tidak efisien. Oleh karena itu, seorang ahli sosiologi yang bernama Amitai Etzioni dikutip dari Islamy(1988, hal. 4. 31) yang mempelajari kedua model tersebut mencetuskan suatu model kebijakan hibrida yang merupakan gabungan/campuran unsur-unsur kelebihan dari model rasional komprehensif dan incremental. Model ini disebut *Mixed Scanning* yang artinya pengamatan gabungan/ campuran.

Menurutnya kelebihan dari model Mixed Scanning adalah setiap elemen/unsure pada masing-masing jenis keputusan (Fundamental/Inkremental) cenderung saling menciptakan keseimbangan (counter balance) terhadap masing-masing kekurangan. Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kelebihan yang hadir dari model rasional komprehensif dan incremental di satukan dalam model analisis gabungan, sehingga kekurangan dari kedua model tersebut diharapkan hilang karena sudah disatukan dalam model gabungan, namun rupanya justru dari penggabungan itu hadir permasalahan dalam bentuk pilihan penggunaannya, karena ruang lingkup dari permasalahan tentu berbeda-beda dan terkadang membingungkan perumus kebijakan. Konsep itu mendekati konsep *deleberative policy* yang memerlukan pelibatan warga negara, mendorong ketersediaan kebutuhan publik. Dimana kebijakan ini disusun untuk mempertimbangkan keanekaragaman maupun saling ketergantungan (Rutiana Dwi Wahyuningsih, 2011):

Dengan melihat data dan fakta yang ada di Cianjur dalam pengelolaan pariwisata terlihat bahwa model mixed scanning ini terlihat sangat tepat digunakan, lebih khususnya di Cianjur selatan. Mengingat bahwa berbagai potensi yang ada di Cianjur selatan ini belum bisa digali secara optimal karena berbagai keterbatasan dan kemampuan pemerintah daerahnya seperti dalam penyediaan infrastruktur yang sangat vital dalam menunjang pariwisata daerah ini. Oleh karena itu, pemerintah daerahnya harus mampu membuat kebijakan yang dapat menarik keterlibatan pihak lain baik swasta maupun masyarakat pada umumnya. (Yoeti, O. 2008).

Sementara berdasarkan observasi dan wawancara diketahui bahwa model formulasi inkremental yang hanya mengcopi paste kebijakan sebelumnya terasa lebih dominan sehingga terjadinya pergantian berbagai pemerintahan tidak terasa banyak perubahan bagi masyarakat Cianjur selatan. Bahkan dalam beberapa kebijakan

formulasinya terasa sangat elitis seperti rencana pemindahan ibukota kabupaten ke kecamatan Cempaka atau pembangunan taman-taman kota yang mempersempit trotoar dinilai merugikan masyarakat serta tanpa mendengar aspirasi dan partisipasi masyarakat sehingga ketika Bupatinya di OTT KPK akhir tahun 2018 masyarakat justru bergembira dan sontak “ngeliwet: di alun-alun kota.

Demikian sebaliknya, di sisi lain model formulasi kebijakan yang rational komprehensif terlihat dikalangan para elite dan pejabatnya dengan adanya kajian dan naskah akademik berupa Kajian *Kawasan Strategis dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Cianjur Selatan, 2017* yang dilakukan oleh konsultan dalam mengkaji pengembangan wisata Cianjur selatan dirasa terlalu canggih dan rigid sehingga sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, Prof Sedarmayanti dalam FGD (2019) menyarankan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat duduk bersama dalam merumuskan kebijakan serta dengan memanfaatkan e-commerce dan digital tourism dalam pengembangan pariwisata Cianjur selatan. Dengan demikian model pendekatan mixed scanning akan menjadi jalan tengah terhadap kesulitan tersebut. Dimana Pemda khususnya yang menjadi leading sektornya yaitu Dinas Pariwisata dapat mengakomodasi berbagai stakeholder untuk melahirkan kebijakan *analysis base evidence* yaitu berdasarkan fakta-fakta yang berkembang dilapangan sehingga kebijakan yang dibuat lebih aplikable.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hasil analisis kebijakan pariwisata di Cianjur selatan Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa disamping kondisi infrastruktur, keterlibatan stake holder lain khususnya swasta menunjukkan kondisi yang belum optimal. Tetapi juga formulasi kebijakan yang dibuat cenderung masih bersifat inkremental, elitis dan rational komprehensif sehingga belum melahirkan dampak perubahan dan peningkatan

pengembangan pariwisata di Cianjur Selatan sehingga justru menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan kolektif sehingga masyarakat terus mendesak pemekaran daerah menjadi Kabupaten Cianjur Selatan yang proposalnya telah sampai ke Mendagri.

Lebih lanjut, posisi daya saing pariwisata Kabupaten Cianjur yang lebih rendah dari daerah lain, sehingga harus menjadi tantangan bagi Kabupaten Cianjur, khususnya Cianjur Selatan dalam memperbaiki dan meningkatkan faktor-faktor pendukung sektor pariwisata, jumlah hotel, jalan beraspal dengan kualitas baik, tingkat hunian hotel, dan tingkat pendidikan tenaga kerja sektor pariwisata berpengaruh secara nyata dan signifikan terhadap industri/sektor pariwisata.

### **Saran**

Upaya pengembangan destinasi pariwisata di Cianjur Selatan relatif lamban bahkan stagnan selain karena pola pendekatan dalam formulasi kebijakan yang bersifat inkremental di satu sisi karena berpijak pada pola dan kebiasaan lama. Tetapi di sisi lain terlalu rational komprehensif yang berpijak pada kajian naskah akademik dan kajian konsultan yang sangat detail dan komprehensif tetapi kemudian kesulitan ketika akan diimplementasikan. Oleh karena itu, model mix scanning menjadi jawaban untuk memecahkan persoalan tersebut yang menggabungkan keunggulan pendekatan inkremental dan rational komprehensif.

Meningkatkan kualitas infrastruktur, salah satunya kualitas jalan. Kualitas jalan yang baik dapat menjadikan akses ke tempat wisata lebih baik dan nyaman dilalui sehingga mendorong wisatawan untuk datang. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum harus ditingkatkan dalam memerhatikan pembangunan infrastruktur terutama yang terkait dengan industri pariwisata

Meningkatkan promosi objek-objek wisata Kabupaten Cianjur. Saat ini Kabupaten Cianjur sudah memiliki *Grand Design* Pembangunan dan Pengembangan Destinasi Wisata, namun melihat masih

rendahnya promosi pariwisata Kabupaten Cianjur, maka diperlukan adanya promosi untuk memperkenalkan program ini kepada wisatawan. Promosi-promosi yang ada saat ini masih kurang efektif. Sarana-sarana yang saat ini sudah ada seperti *Tourism Information and Center* harus lebih dioptimalkan dalam memberikan informasi kepada wisatawan dan calon wisatawan yang akan datang. Selain itu, dalam promosinya Kabupaten Cianjur juga harus menonjolkan keunggulan kondisi alam yang dimiliki untuk menarik wisatawan.

## DAFTAR PUSTAKA

Sumber elektronik

- A. J. Burkart and S. Medlik: (1974). TOURISM: PAST, PRESENT AND FUTURE. *Journal of Travel Research*, 13(3). <https://doi.org/10.1177/004728757501300307>
- Achdiat -, Y. M. (2017). Model Kebijakan Peningkatan laporan Kematian Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bandung Barat. *Sosiohumaniora*, Vol 19, No(tertiba adminiostiasi kependudukan), 9. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.9066>
- Bobby Newman Dana R. Reinecke Deborah L. Meinberg. (2000). Self-management of varied responding in three students with autism, *Volume15*,(2), 6. [https://doi.org/https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-078X\(200004/06\)15:2<145::AID-BIN50>3.0.CO;2-3](https://doi.org/https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-078X(200004/06)15:2<145::AID-BIN50>3.0.CO;2-3)
- Edgell Sr, David L., Allen, Maria D., Smith, G., Jason, R. S. (2008). *Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today and Tomorrow* (First edit). Elsevier Inc. Diambil dari <https://www.pdfdrive.com/tourism-policy-and-planning-yesterday-today-and-tomorrow-e184509039.html>
- I Wayan Suardana. (2016). ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA, *kebijakan*,(kebij), 26. Diambil dari [https://www.researchgate.net/publication/301514282\\_ANALISIS\\_KEBIJAKAN\\_PENGEMBANGAN\\_PARIWISATA\\_Intervensi\\_Melalui\\_Kebijakan\\_Pariwisata\\_Berkelanjutan\\_di\\_Bali/link/57170e6208ae497c1a5709e0/download](https://www.researchgate.net/publication/301514282_ANALISIS_KEBIJAKAN_PENGEMBANGAN_PARIWISATA_Intervensi_Melalui_Kebijakan_Pariwisata_Berkelanjutan_di_Bali/link/57170e6208ae497c1a5709e0/download)
- inpres. nomor 16 tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata*. (2005). Diambil dari [www.kemenpar.go.id > post > instruksi-presiden-republik-indonesia-nomo](http://www.kemenpar.go.id/post/instruksi-presiden-republik-indonesia-nomo).
- John W. Creswell. (2008). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications, Inc. Diambil dari <https://www.pdfdrive.com/john-w-creswell-research-design-qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e24960021.html>
- Jones CG, Lawton JH, S. (1994). Organisms as ecosystem engineers, 15. Diambil dari [https://www.researchgate.net/publication/258223063\\_Jones\\_CG\\_Lawton\\_JH\\_S\\_hachak\\_M\\_Organisms\\_as\\_ecosystem\\_engineers\\_Oikos\\_69\\_373-386](https://www.researchgate.net/publication/258223063_Jones_CG_Lawton_JH_S_hachak_M_Organisms_as_ecosystem_engineers_Oikos_69_373-386)
- MUTIARA SYAHRIR. (2018). MODEL FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Administrasi Negara. Diambil dari <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/74673>
- Perda Prov. Jawa Barat No. 15 Tahun 2015 Tentang "Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025*. (2015). Diambil dari <http://www.disparbud.jabarprov.go.id/applications/frontend/index.php?mod=peraturan&act=showdetail&id=103>
- Rina Trisnawati, Wiyadi Wiyadi, E. P. (2008). ANALISIS DAYA SAING INDUSTRI PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI

- DAERAH: (KAJIAN  
PERBANDINGAN DAYA SAING  
PARIWISATA ANTARA  
SURAKARTA DENGAN  
YOGYAKARTA). *economic Journal of  
emergency Markets, Volume 13(2)*.  
Diambil dari [https://journal.  
iii.ac.id/JEP/article/view/224/220](https://journal.iii.ac.id/JEP/article/view/224/220)
- Rutiana Dwi Wahyuningsih. (2011).  
Membangun Kepercayaan Publik  
Melalui Kebijakan Sosial Inklusif.  
*Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol 15,  
No, 12*. [https://doi.org/  
10.22146/jsp.10923](https://doi.org/10.22146/jsp.10923)
- undang-undang republik indonesia nomor  
10.tahun 2009 tentang kepariwisataan*.  
(2009). Diambil dari [kemenpar.go.id ›  
old\\_file › 4636\\_1364-UU Tentang  
Kepariwisataan net 1](http://kemenpar.go.id/old_file/4636_1364-UU_Tentang_Kepariwisataan_net_1)
- World Tourism Organization. 1995*. (1995).  
Diambil dari [http://statistics.  
unwto.org/sites/all/files/docpdf/parti.pd  
f](http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/parti.pdf)
- Yoeti, O. A. (2008). *Ekonomi Pariwisata:  
Introduksi, Informasi Dan  
Implementasi*.  
(Kompas, Ed.). Jakarta: Buku Kompas.  
Diambil dari [http://library.fis.uny.ac.i d/  
opac/index. php?p=show\\_detail&  
id=1204](http://library.fis.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=1204)
- Sumber Non elektronik
- Putra, I., Flroriyana,(2012) Analisis Daya  
Saing dan faktor-Faktor yang  
Mempengaruhi Pariwisata Kabupaten  
Cianjur, IPB Bogor,
- Judisseno, Rimsky, 2017, Aktivitas dan  
Kompleksitas Kepariwisataan:  
Mengkaji Kebijakan Pembangunan  
Kepariwisataan, Gramedia Pustaka  
Utama. Kajian Kawasan Strategis dan  
Kawasan Pengembangan Pariwisata  
Cianjur Selatan, 2017 PT. Puri  
Dimensi,
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 01  
Tahun 2017 Tentang Rencana Induk  
Pembangunan Kepariwisataan  
Kabupaten Cianjur dan Penyelenggaraan  
Kepariwisataan